

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TANGERANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Birgitta Christine Akira¹, Carine Aurelia²

birgittachristine@gmail.com¹, carineaurelia04@gmail.com²

Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Infrastruktur jalan memegang peranan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Kota Tangerang, sebagai pusat ekonomi di Provinsi Banten, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan yang memadai seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sebagai respons, Pemerintah Kota Tangerang menetapkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026, yang menempatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, implementasinya dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kompleksitas pembebasan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur jalan di Kota Tangerang serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi, dan kontribusinya terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Kebijakan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kota Tangerang, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan merupakan elemen utama dalam pembangunan daerah yang berfungsi sebagai penunjang utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jalan yang baik akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong mobilitas masyarakat. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah, pemerintah memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan jalan. Pembangunan infrastruktur jalan yang terencana dengan baik tidak hanya menciptakan efisiensi dalam sistem transportasi, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang, sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Banten, mengalami pertumbuhan yang pesat baik dalam sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Dengan tingginya aktivitas ekonomi, kebutuhan akan infrastruktur jalan yang memadai menjadi semakin mendesak. Pemerintah Kota Tangerang telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya melalui Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026. Peraturan ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah, termasuk dalam aspek peningkatan infrastruktur jalan.

Dalam peraturan tersebut, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan infrastruktur jalan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemacetan, tetapi juga untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, yang

pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan investasi di Kota Tangerang. Dengan adanya jalan yang lebih baik, aksesibilitas menuju pusat bisnis, kawasan industri, dan fasilitas umum menjadi lebih lancar, sehingga mendorong pengembangan ekonomi yang lebih inklusif.

Berdasarkan implementasi kebijakan ini, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran pembangunan yang sering kali menghambat realisasi proyek infrastruktur secara optimal. Kemudian pembebasan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan baru juga menjadi permasalahan yang kompleks, mengingat tingginya harga tanah di kawasan perkotaan serta potensi konflik dengan masyarakat setempat.

Dari sisi ekonomi, infrastruktur jalan yang memadai dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap berbagai sektor. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan daya saing daerah dalam menarik investasi. Investor cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur yang baik karena dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga diuntungkan dengan adanya akses jalan yang lebih baik, yang memungkinkan mereka menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan produktivitas usaha mereka.

Manfaat ekonomi melalui pembangunan infrastruktur jalan juga memiliki dampak sosial. Dengan adanya jalan yang lebih baik, akses masyarakat terhadap layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan menjadi lebih mudah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah di Kota Tangerang. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan harus mempertimbangkan aspek inklusivitas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur jalan di Kota Tangerang serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan hukum dengan analisis terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, terutama Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026, serta regulasi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan pertumbuhan ekonomi. Analisis terhadap dokumen hukum ini bertujuan untuk memahami dasar hukum kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur jalan.

Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat), serta pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Data empiris ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai dampak nyata pembangunan jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang. Dengan kombinasi pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait hubungan antara kebijakan infrastruktur jalan dan perkembangan ekonomi daerah..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Infrastruktur Jalan Di Kota Tangerang

Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kota Tangerang, yaitu Pak Eka Media Rahmadan, dalam wawancaranya. Pak

Eka mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah daerah terkait peningkatan infrastruktur jalan di Kota Tangerang berfokus pada dua isu strategis utama, yakni penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan. Meskipun penanganan banjir tidak dapat sepenuhnya menghilangkan masalah tersebut, upaya pemerintah lebih mengarah pada pengurangan dampak banjir yang terjadi di banyak titik jalan di kota ini. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah genangan air yang sering kali menggenangi jalan-jalan di Kota Tangerang, yang menjadi penyebab utama kerusakan pada infrastruktur jalan. Hal ini disebabkan oleh ketahanan aspal yang terbatas terhadap air, yang akhirnya mempercepat proses kerusakan jalan.



Gambar 1. Wawancara Bersama Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kota Tangerang Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kota Tangerang, Pak Eka, ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan jalan, terdapat pembagian kewenangan berdasarkan jenis jalan, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Pembagian kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, jalan nasional menghubungkan antarprovinsi dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jalan provinsi menghubungkan antar kota atau kabupaten, sementara jalan kota menghubungkan antar kecamatan dalam wilayah Kota Tangerang. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola jalan terbatas pada jalan kota dan jalan lingkungan, sedangkan jalan nasional dan provinsi harus dikelola oleh kementerian dan pemerintah provinsi terkait.

Kemudian Pak Eka juga menyampaikan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang bertujuan untuk memperbaiki kualitas jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan infrastruktur jalan yang baik, diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan mendatangkan investasi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satu tantangan utama dalam pembangunan jalan adalah keterbatasan anggaran, yang sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa anggaran daerah terutama berasal dari PAD, yang diperoleh dari pajak daerah. Pak Eka menyebutkan bahwa PAD yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan.

Namun, karena PAD terbatas, pelaksanaan pembangunan jalan sering kali terhambat dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang cepat. Bahkan, proyek jalan yang direncanakan tahun ini mungkin baru bisa dilaksanakan dua atau tiga tahun ke depan, tergantung pada ketersediaan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan bijak dan efisien, serta mengutamakan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. Keterbatasan anggaran ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam

pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang menambahkan bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah anggaran adalah dengan meningkatkan PAD melalui investasi yang datang dari sektor swasta. Sebagai contoh, di Tangerang Selatan, pengembang besar seperti Sumarekon, Paramon, dan Sinarmas membangun jalan-jalan di kawasan mereka untuk menarik investasi. Jalan yang dibangun oleh pengembang ini tidak diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola, melainkan tetap dikelola oleh pengembang dengan anggaran pemeliharaan mereka sendiri. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat mengurangi beban anggaran dan tetap mendorong pembangunan infrastruktur yang dapat menarik investor.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi pembangunan jalan, Pak Eka menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang memiliki prosedur yang jelas dalam mengevaluasi tingkat kerusakan jalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Infrastruktur Jalan, perbaikan jalan dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan. Jika kerusakan jalan kurang dari 50%, jalan tersebut hanya membutuhkan pemeliharaan rutin. Namun, jika kerusakan sudah melebihi 50%, maka jalan tersebut perlu direhab atau dibangun kembali. Prosedur ini membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap jalan yang diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerusakannya.

Dampak positif dari pembangunan jalan yang baik sangat terasa dalam peningkatan konektivitas antarwilayah. Jalan yang baik dapat memperlancar arus barang dan orang, serta meminimalisir kemacetan. Hal ini dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik, termasuk jalan, dapat menarik investasi dari luar daerah. Dengan infrastruktur yang memadai, maka biaya logistik dapat ditekan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kualitas jalan juga dapat berpengaruh terhadap harga tanah di sekitar jalan tersebut. Hal ini sudah terbukti di Tangerang Selatan, di mana pembangunan jalan dan infrastruktur yang baik meningkatkan nilai tanah dan properti di sekitarnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan, memperbaiki konektivitas antarwilayah, dan mendatangkan investasi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah, yang mempengaruhi waktu pelaksanaan dan kualitas proyek pembangunan jalan. Meskipun begitu, dengan adanya kebijakan yang baik dan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta, pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang dapat terus berkembang, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Tangerang

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang menghadapi sejumlah hambatan yang cukup besar, yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah daerah Kota Tangerang sangat bergantung pada Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan. Akan tetapi, PAD yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk membiayai seluruh proyek yang telah direncanakan. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan proyek jalan yang direncanakan pada suatu tahun terpaksa harus tertunda atau bahkan dibagi dalam beberapa tahap pelaksanaan, tergantung pada ketersediaan dana yang ada. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan PAD melalui investasi, anggaran yang terbatas tetap menjadi tantangan yang cukup besar dalam pembangunan jalan.

Masalah pembagian kewenangan juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Pembagian kewenangan pengelolaan jalan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Meskipun pemerintah daerah Kota Tangerang memiliki kewenangan atas jalan kota dan jalan lingkungan, jalan nasional dan provinsi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Ketika ada jalan yang menghubungkan Kota Tangerang dengan daerah lain, yang termasuk dalam kategori jalan nasional atau provinsi, pemerintah daerah harus mengoordinasikan perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut dengan pihak pusat atau provinsi. Koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sering kali menyebabkan proyek perbaikan jalan tertunda, sehingga mempengaruhi keseluruhan perencanaan infrastruktur di tingkat daerah.

Masalah pengadaan tanah juga menjadi kendala yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Dalam beberapa proyek jalan, pemerintah daerah membutuhkan tanah untuk memperluas atau membangun jalan baru. Proses pengadaan tanah sering kali menemui kendala, baik dari segi penyelesaian sengketa lahan maupun dari segi kesepakatan harga ganti rugi antara pemerintah dan pemilik tanah. Proses ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan sering kali menghambat kelancaran pembangunan jalan. Hal ini dapat memperlambat progres proyek, karena tanpa pengadaan tanah yang tuntas, pembangunan jalan tidak dapat dimulai.

Kerusakan jalan yang cepat juga menjadi permasalahan kebijakan pembangunan jalan. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan perbaikan pada jalan-jalan yang rusak, kerusakan sering kali terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah struktur tanah yang tidak stabil, kendaraan berat yang terus melewati jalan, dan masalah genangan air akibat banjir yang merusak lapisan aspal. Berdasarkan hasil wawancara Bersama Pak Eka menjelaskan bahwa jalan yang terendam air dalam waktu lama akan lebih cepat mengalami kerusakan. Kendaraan berat yang terus melewati jalan juga mempercepat proses kerusakan, karena beban yang ditimbulkan oleh kendaraan tersebut lebih tinggi daripada yang dapat ditanggung oleh jalan biasa. Akibatnya, meskipun pemerintah daerah telah melakukan perbaikan, jalan-jalan tersebut sering kali kembali rusak dalam waktu yang singkat.

Kemudian kurangnya koordinasi dengan pihak terkait, baik itu dengan pengembang swasta maupun pihak lainnya, juga menjadi hambatan yang tidak bisa diabaikan. Sebagai contoh, pengelolaan jalan yang dibangun oleh pengembang swasta sering kali menjadi masalah ketika pengembang tersebut tidak menyerahkan pengelolaan jalan kepada pemerintah daerah setelah pembangunan selesai. Hal ini membuat pemerintah daerah tidak dapat mengontrol pengelolaan jalan secara penuh, meskipun jalan tersebut merupakan bagian dari infrastruktur kota yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Koordinasi yang tidak optimal antara pemerintah daerah dengan pengembang swasta atau pihak terkait lainnya dapat memperlambat atau menghambat perbaikan dan pemeliharaan jalan yang ada.



Gambar 2. Wawancara Bersama Pak Adin Warga Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Pak Adin, seorang warga Kota Tangerang yang terdampak pembangunan ini, permasalahan sosial berperan dalam menghambat implementasi kebijakan pembangunan jalan. Beberapa proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang mengalami protes dari masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan. Salah satu contohnya adalah perbaikan jalan, yang terkadang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat yang merasa dirugikan karena membuat kemacetan sehingga mengurangi mobilitas mereka.

Hambatan diatas menunjukkan betapa kompleksnya pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Tangerang. Keterbatasan anggaran, masalah pembagian kewenangan, pengadaan tanah yang rumit, kerusakan jalan yang cepat, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, serta dampak sosial dan lingkungan yang harus dihadapi, semuanya mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pembangunan infrastruktur jalan. Namun, dengan adanya kebijakan yang jelas, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta, serta penanganan yang tepat terhadap masalah sosial dan lingkungan, diharapkan hambatan-hambatan ini dapat diatasi dan pembangunan jalan di Kota Tangerang dapat terus berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Pemerintah daerah Kota Tangerang telah menetapkan kebijakan strategis dalam pembangunan infrastruktur jalan dengan fokus utama pada dua isu besar, yaitu penanganan banjir dan perbaikan kualitas jalan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Tangerang dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur jalan yang lebih baik. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan jalan. Namun, proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan pengelolaan jalan yang tidak selalu jelas, serta masalah pengadaan tanah yang menghambat kelancaran pelaksanaan proyek.

Meskipun kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Kota Tangerang sudah dilaksanakan dengan baik, keberhasilannya sangat bergantung pada penanganan hambatan-hambatan yang ada. Pengelolaan anggaran yang lebih efisien, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta, serta penyelesaian masalah sosial dan lingkungan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sukses. Dengan solusi yang tepat, diharapkan perbaikan infrastruktur jalan di Kota Tangerang dapat berjalan lancar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustin, I. W., & Hariyani, S. (2023). *Pengelolaan infrastruktur kota dan wilayah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mulyono, A. T. (2022). *Uji Laik Fungsi Jalan Berkeselamatan dan Berkepastian Hukum*. Yogyakarta: UGM PRESS.

Jurnal:

- Fauzan, M., Manggala, B. S., & Nasution, A. I. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Jalan Di Daerah Ditinjau Berdasarkan Status Jalan. *Dinamika Hukum*, 25(1), 34-56.
- Marthalina, M. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 1-24.
- Nawas, A. (2022). Pengaruh Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Tangerang Khususnya Angkutan Kota. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5915-5925.
- Ratna, N. L. M. D., Mulyanto, B., & Munibah, K. (2023). Peran Administrasi Pertanahan dalam Perkembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 7(2), 215-234.
- Risnandar, R. N., & Budiman, D. (2023). Skala Prioritas Usulan Penanganan Jalan Dalam Upaya Strategi Peningkatan Kemantapan Jalan. *JITSi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*, 4(1), 35-44.
- Wahab, R. R. (2022). *Analisis Penolakan Pembayaran Ganti Rugi Oleh Pemilik Tanah Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol Ruas Cengkareng–Batu Ceper–Tangerang Untuk Kepentingan Umum* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).